

**POTRET PEMIKIRAN ISLAM DI ERA TRANSISI
(Sebuah Fenomena Menurunnya Gairah Pemikiran Islam di
Indonesia)**

Faisal Attamimi

Dosen Jurusan Ushuluddin STAIN Datokarama Palu

Abstract

New Order Government is perceived by many as a unique socio-political sphere. At the time, nobody acknowledged that New Order was democratic and provided a sufficient public sphere to grow and develop a culture of different ideas. However, it was in that epoch that Islamic thought in Indonesia suffered a significant development, that was in the past a quarter century before the reformation era. How to describe the Islamic thought in Indonesia in transition era to come to democracy? This article will describe the phenomena.

Kata Kunci : Pemikiran Islam, era transisi, Orde Baru

Pendahuluan

Era Orde Baru yang dipandang oleh banyak kalangan sebagai iklim politik dan sosial yang unik, dimana pada masa itu tak seorang pun menurut Marzuki Wahid yang mengakui bahwa Orde Baru itu demokratis dan menyediakan ruang publik (*public sphere*) yang cukup untuk tumbuh dan berkembangnya budaya perbedaan pendapat. Gus Dur menyebut Orde Baru sebagai sistem otoriter yang tidak sampai pada tingkat tirani, Arif Budiman mengistilahkannya dengan Negara Otoriter Birokratis Rente dan Moh. Mahfud MD menyebutnya Negara Non-Demokratis (Marzuki, 2001: 145-146).

Akan tetapi pada masa Orde Baru itu justru pemikiran Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang berarti yakni pada seperempat abad terakhir sebelum reformasi bergulir. Kemajuan itu

dapat dilihat dari demikian kayanya tema pembaruan pemikiran yang dimunculkan oleh para pemikir Islam Indonesia. Tema itu tidak lagi berputar-putar pada mata rantai teosentrik dan melulu bersifat politis-ideologis, melainkan telah memasuki ruang yang betul-betul bersifat kultural, teologis-antroposentris, dan filosofis-sosiologis, dimana pemikiran itu hadir. Ini tentunya satu fase perkembangan baru yang membedakan dengan puluhan tahun sebelumnya dengan yang memiliki kecenderungan kuat untuk menjadikan Islam sebagai perjuangan politik-ideologis di negeri ini, yang memaksa Islam harus diperhadapkan dengan ideologi-ideologi lain seperti nasionalisme dan sosialisme.

Dari tema-tema itu terlihat kegairahan berpikir kritis dan “orisinal” melalui penawaran pemikiran baru yang signifikan dan bermutu, yang tidak saja mendinamisasi kinerja intelektual di Indonesia, tetapi juga bisa disejajarkan dengan pemikir Islam lainnya di belahan bumi ini.

Bagaimanakah potret pemikiran Islam di Indonesia pada era transisi menuju demokrasi ini? Tulisan ini mencoba mengungkap fenomena tersebut.

Potret Pemikiran Islam di Indonesia

Era Orde Baru

Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa sepanjang tahun 1970-an, 1980-an, sampai 1990-an, Indonesia telah mencatat sebuah kebangkitan Islam yang amat progresif dan begitu memiliki masa depan. Inilah fenomena luar biasa dan mengejutkan, apabila kenyataan itu dibandingkan dengan yang seringkali disebut sebagai “*Islamic revival*” (kebangunan kembali Islam) yang sempat dialami negara jiran Malaysia dan beberapa negara-negara Islam lain yang khrismanya secara tradisional dipertimbangkan lebih Islam daripada Indonesia (Barton, 1999: 3-4).

Sejumlah studi, baik dalam kaitan tugas akademik maupun riset-riset ilmiah lainnya menjelaskan perkembangan pemikiran Islam di Indonesia berikut tokoh-tokohnya. Perkembangan pemikiran tersebut secara umum mereka sebut sebagai horizon modernisasi Islam di Indonesia dan kemunculan “Islam Modernis”,

atau lebih tegas seperti yang dikatakan Barton, “Islam Neo-Modernis” (Woodward, 1998: 16).

Neo-Modernisme Islam di Indonesia pada umumnya diasosiasikan dengan Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan lain-lain. Neo-Modernisme adalah paham teologi Islam yang khas Indonesia, yang memahami teks-teks dan tradisi-tradisi Islam dalam perspektif ganda yaitu etika sosial dan kesalehan personal, dan pada saat yang sama tidak menonjolkan perbedaan-perbedaan sektarian dalam masyarakat Islam serta konsep negara Islam.

Selama dua dasawarsa, ditengah tekanan suatu rezim politik yang sangat hegemonik terhadap umat Islam, harus diakui bahwa para pemikir Muslim memang tampak mengerahkan seluruh daya kreatifitas dan kritisisme berpikinya dalam rangka penguatan pembaruan pemikiran Islam, mengimbangi paksaan proyek modernisasi negara, bahkan rezim Internasional terhadap Indonesia. Sepanjang masa itu, apakah sebagai “jawaban” atau *counter*, atau kritik, bisa kita catat telah muncul beberapa tokoh utama dan gagasan-gagasan pembaruan pemikiran Islam yang khas masing-masing sebagai tawaran baru. Sekadar menyebut contoh, Nurcholish Madjid, (1993) misalnya, dikenal dengan label pemikiran “sekularisasi Islam”nya, Abdurrahman Wahid (1989) dengan “pribumisasi Islam”nya, Jalaluddin Rakhmat (1986) dengan “Islam Alternatif”nya, Amin Rais (1996) dengan “tauhid sosial”nya, Djohan Effendi (1978: 12-17) dengan “teologi kerukunan”nya, Moeslim Abdurrahman (1995) dengan “Islam transformatifnya”nya, Kuntowijoyo (1999) dengan “Ilmu sosial transformatif”nya, dan demikian pula yang lainnya.

Perhatian para pemikir ini lebih tertuju pada persoalan-persoalan sosial, politik, atau ekonomi dan mengaitkannya dengan ajaran Islam. Fokus perhatian ini merupakan upaya menyikapi realitas sosial, politik dan ekonomi ketika negara Orde Baru secara sistematis dan terus menerus melakukan intervensi secara berlebihan terhadap umat Islam dan bentuk-bentuk pengamalan keagamaannya.

Era Reformasi hingga Kini

Seiring dengan bergulirnya reformasi, hiruk pikuk pemikiran Islam seperti pada zaman Orde Baru itu nampaknya

mengalami stagnasi. Di sinilah kegetiran di balik kemajuan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dua puluh lima tahun terakhir. Mungkin akibat tidak tuntasnya tawaran pemikiran mereka, atau karena “kegagalan” gerakan Neo-Modernisme Islam di Indonesia, sehingga kemudian pemikiran dan gerakan Islam fundamentalistik muncul kembali justru pada saat beberapa tokoh Neo-Modernis Muslim sedang memegang tampuk kekuasaan negara. Ini adalah sebuah ironi dalam sejarah perjuangan Islam di negeri ini.

Sejak periode Presiden Habibie hingga kini, sebab sejak itu pemikiran Islam Indonesia tampak mengalami *setback* yang berarti. Di tengah-tengah derasnya arus demokratisasi dan apresiasi terhadap pluralisme pasca tumbanganya Orde Baru, umat Islam malah kembali menampilkan wajah ideo-fundamentalistiknya. Bukan sekadar ditunjukkan lewat maraknya perjuangan “Piagam Jakarta” di Parlemen, melainkan juga diekspresikan dengan penetapan kembali “asas Islam” dalam AD/ART ormas dan orpol, serta pembentukan “laskar-laskar” yang bersimbolkan Islam. Bahkan “aspirasi negara Islam” dan pemberlakuan “syariat Islam di berbagai daerah pun dimunculkan kembali oleh berbagai organisasi baru Islam yang fundamentalistik itu. Jika kita cermati, kemunculan fenomena ini hampir bisa disebut sebagai penjelmaan baru, “reinkarnasi”, atau metamorfosis dari mainstream Islam puluhan tahun sebelumnya, dimana Islam dijadikan sebagai sarana perjuangan politik. Hal itu terlihat dari nama-nama partai politik Islam dan bentukan organisasi-organisasi Islam yang baru, mengiringi derap reformasi dan transisi menuju demokrasi, ada Partai Masyumi Baru, PSII, Partai NU, dan partai-partai Islam lainnya, ada Laskar jihad, meskipun kemudian ada yang membubarkan diri, ada Ikhwanul Muslimin, Mujahidin, NII dan lain-lain.

“Sekularisasi Islam”nya Nurcholish Madjid tahun 1970-an, sekarang dijawab dengan perjuangan memasukkan “Piagam Jakarta” dalam UUD 1945 dan Pemberlakuan “Syariat Islam” di berbagai daerah. Wacana “Piagam Jakarta” ini pernah muncul dan ramai diperjuangkan oleh politisi muslim sebelum dan saat Sidang Umum MPR 1999 dan Sidang Tahunan MPR 2000. Beberapa Partai Islam, seperti PPP, PK, PBB, PDU, PUI, PKU, getol memperjuangkan hal ini. Sedangkan aspirasi pemberlakuan

“Syari’at Islam” selain muncul dalam pembahasan RUU Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh di DPR, juga beberapa kelompok umat Islam di daerah telah menyatakan keinginannya. Seperti di Sulawesi Selatan, keinginan itu terungkap pada saat setelah pelaksanaan Kongres Umat Islam pada tanggal 19 – 21 Oktober 2000 di Makassar (Haq, 2001: 1).

Demikian pula “Pribumisasi Islam”nya Gus Dur tahun 1980-an, direspon dengan maraknya simbol-simbol kearaban dan Timur Tengah sebagai simbol Islam. “Teologi Kerukunan”nya Djohan Effendi tahun 1970-an, dijawab dengan maraknya konflik antar agama di berbagai daerah, seperti di Poso, Ambon dan lain-lain. Semua itu terjadi justru pada saat sejak Gus Dur dan Djohan Effendi ketika itu berada di istana negara, dan Cak Nur ketika itu diposisikan sebagai “Guru Bangsa”. Atau, mungkin akibat masuknya mereka ke dalam kekuasaan negara itulah arah perjalanan sejarah pemikiran keislaman itu berbelok. Di sinilah, betapa arah sejarah pemikiran itu tidak selalu berjalan linier.

Setidaknya itulah gambaran realitas perkembangan pemikiran Islam Indonesia di era transisi ini. Banyak pertanyaan yang patut kita renungkan dan memerlukan kajian lebih lanjut di masa depan. Apakah ini sebuah kegagalan dari konsep pemikiran Islam kaum Neo-Modernis dan semacamnya, atau hanya sebuah ujian dan tantangan bagi dapat tidaknya gagasan-gagasan pemikiran itu menyelesaikan problem ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an? Atau mungkin konsep pemikiran Islam itu sangat elitis sehingga tidak atau belum mengakar di tengah-tengah masyarakat muslim sekalipun? Atau mungkin juga karena godaan politik dan kekuasaan telah meninabobokan para pemikir sehingga nampak mengalami stagnasi? Atau fenomena fundamentalisme di era reformasi ini juga merupakan bagian dari pemikiran Islam yang lahir sebagai jawaban terhadap problem umat dan bangsa? Akankah fenomena ini mengalami perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang atau sebaliknya justru semakin memudar? Tentunya semua ini memerlukan kajian lebih lanjut dari para pemikir Islam masa depan. Sehingga Islam sebagai agama “rahmat bagi seluruh alam” dan “cocok untuk segala tempat dan zaman” dapat menjadi kenyataan di tengah-tengah kehidupan dan menjadi solusi bagi berbagai problem kemanusiaan.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa potret pemikiran di Indonesia pada masa transisi mengalami kelesuan disebabkan oleh tidak tuntasnya penawaran pemikiran yang dilakukan oleh para pemikir Islam di Indonesia. Akibatnya, pemikiran dan gerakan Islam fundamentalis muncul kembali justru pada saat beberapa tokoh Neo-Modernis muslim sedang memegang tampuk kekuasaan negara.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 1995. Moeslim., *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Barton, Greg. 1999. *Gagasan Islam Liberal, Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*, Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI, dan The Ford Foundation.
- Effendi, Djohan. "Dialog antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?", *Prisma*, No. 5, Jakarta: Juni 1978.
- Haq, Hamka. 2001. *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya*. Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Marzuki & Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara. Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS.
- Madjid, Nurcholish. 1993. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Rais, Amin. 1996. *Tauhid Sosial*. Bandung: Mizan.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1986. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.
- Wahid, Abdurrahman. 1989. "Pribumisasi Islam" dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (Ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M.
- Woodward, Mark R. (ed). 1998. *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Terjemahan Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan.